

De-eroplanisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016

Farandy Nurmeiga¹, Henny Saptatia Drahati Nugrahani²

¹School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, farandynm@gmail.com

²School of Strategic and Global Studies, Universitas Indonesia, henny.saptatia@ui.ac.id

ABSTRAK

Tahun 2020 ditandai sebagai 57 tahun berlangsungnya hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa. Selama hubungan diplomatik tersebut berlangsung, Turki juga berupaya untuk menjadi bagian dari keanggotaan penuh Uni Eropa. Uni Eropa memiliki kepentingan untuk bertindak sebagai kekuatan normatif di Turki selama proses negosiasi keanggotaan. Namun, proses negosiasi tidak berjalan dengan mudah terutama pasca terjadinya kudeta militer 15 Juli 2016 di Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses de-eroplanisasi di Turki pasca peristiwa upaya kudeta militer tahun 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Tulisan ini berkesimpulan bahwa de-eroplanisasi di negara anggota kandidat dapat terjadi apabila Uni Eropa tidak mampu mempertahankan legitimasinya sebagai kekuatan normatif seperti yang terjadi di Turki.

Kata kunci: Turki, Uni Eropa, keanggotaan, legitimasi, de-eroplanisasi

ABSTRACT

The year 2020 is marked as 57 years of diplomatic relations between Turkey and the European Union. During these diplomatic relations, Turkey also seeks to become part of the full membership of the European Union. The EU has an interest in acting as a normative power in Turkey during the membership negotiation process. However, the negotiation process did not run easily, especially after the July 15 2016 military coup in Turkey. This study aims to explain the de-Europeanization process in Turkey after the military coup attempt in 2016. The research approach used is qualitative research with the type of case study research. This paper concludes that de-Europeanization in candidate member countries can occur if the European Union is unable to maintain its legitimacy as a normative power as happened in Turkey.

Keywords: Turkey, European Union, membership, legitimacy de-Europeanisation

Pendahuluan

Tahun 2020 ditandai sebagai 57 tahun berlangsungnya hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa. Kerja sama antar keduanya dibangun pertama kali dalam skema *customs union* di tahun 1963. Di sisi lain, Turki juga berupaya untuk menjadi bagian dari keanggotaan penuh Uni Eropa. Turki baru mendapatkan status sebagai negara kandidat dari Uni Eropa di tahun 1999. Turki perlu terlebih dahulu melakukan reformasi hukum dalam negeri agar sesuai dengan Kriteria

Kopenhagen yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai syarat awal sebelum dimulainya negosiasi resmi keanggotaan. Pada akhirnya Turki secara resmi memulai negosiasi keanggotaan Turki dengan Uni Eropa di tanggal 3 Oktober 2005.

Negosiasi resmi keanggotaan adalah salah satu strategi Uni Eropa untuk menjalankan peran sebagai aktor global yang memiliki kekuatan normatif dalam

membangun hubungan dengan negara lain.¹ Namun, strategi yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Turki tidaklah mudah karena adanya dinamika politik yang memengaruhi proses negosiasi keanggotaan.

Di tahun 2016, politik dalam negeri Turki terjadi guncangan akibat adanya upaya kudeta militer di tanggal 15 Juli untuk membubarkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi, Justice and Development Party*). Kebijakan yang dibuat oleh Turki sebagai bentuk respons terhadap upaya kudeta tidak sejalan dengan semangat universalisme yang diagungkan Uni Eropa.

Hal tersebut juga mengakibatkan muncul diskusi di antara cendekiawan ilmu hubungan internasional tentang pengaruh kekuatan normatif Uni Eropa di Turki yang bersifat eropenisasi dan de-eropenisasi.²

Onis dan Yilmaz menyebut periode tahun 2002-2005 sebagai periode emas proses *deep europeanization* sebab campur tangan Uni Eropa dapat memberikan dampak demokratisasi serta perbaikan ekonomi bagi Turki sebelum dimulainya negosiasi keanggotaan. Namun, periode tahun 2005-2009, momentum tersebut mulai bergeser menjadi *loose europeanization* terutama setelah partai AKP mampu memenangkan pemilihan umum tahun 2007 dan kebijakan luar negeri Turki mulai beralih ke negara-negara erasia.³

¹ Michelle Pace, "The Construction of EU Normative Power*," *JCMS: Journal of Common Market Studies* 45, no. 5 (December 1, 2007): 1041–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00759.x>.

² Gözde Yilmaz, "From Europeanization to De-Europeanization: The Europeanization Process of Turkey in 1999–2014," *Journal of Contemporary European Studies* 24, no. 1 (January 2, 2016): 86–100, <https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1038226>.

³ Ziya Öniş and Şuhsnaz Yilmaz, "Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era," *Turkish Studies* 10, no. 1 (March 1, 2009): 7–24, <https://doi.org/10.1080/14683840802648562>.

Yilmaz (2004) menjelaskan fenomena pergeseran sikap dari eropenisasi menjadi de-eropenisasi oleh negara kandidat anggota Uni Eropa, seperti di Turki tahun 2011-2014.⁴ Pembahasan tentang de-eropenisasi di Turki kemudian mulai berkembang menjadi sikap Uni Eropa yang kesulitan dalam melakukan reformasi hukum⁵, penegakkan demokrasi⁶, serta kebebasan berpendapat⁷ di Turki terutama pasca partai AKP memenangkan pemilu tahun 2007.

Peristiwa kudeta yang dilakukan oleh militer untuk menjatuhkan pemerintahan partai AKP tahun 2016 dapat menjadi titik balik perubahan peta politik di Turki. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Aydin-Duzgit (2018) menyimpulkan bahwa hubungan Turki dan Uni Eropa semakin menjauh pasca peristiwa kudeta tersebut. Uni Eropa menilai pemerintahan Presiden Erdoğan dan partai AKP tidak mampu mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam merespons upaya kudeta militer. Sementara publik Turki menilai intervensi Uni Eropa terhadap gejolak politik Turki sudah tidak lagi relevan.⁸ Perlu ada penelitian lebih lanjut yang menggunakan sudut pandang elite partai AKP dalam menanggapi kekuatan normatif Uni Eropa pasca upaya kudeta militer tersebut.

⁴ Yilmaz, "From Europeanization to De-Europeanization: The Europeanization Process of Turkey in 1999–2014."

⁵ Beken Saatçioğlu, "De-Europeanisation in Turkey: The Case of the Rule of Law," *South European Society and Politics* 21, no. 1 (2016/01/02 2016), <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1147994>.

⁶ Münevver Cebeci, "De-Europeanisation or Counter-Conduct? Turkey's Democratisation and the EU," *South European Society and Politics* 21, no. 1 (2016/01/02 2016), <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1153996>.

⁷ Gözde Yilmaz, "Europeanisation or De-Europeanisation? Media Freedom in Turkey (1999–2015)," *South European Society and Politics* 21, no. 1 (2016/01/02 2016), <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1148102>.

⁸ Senem Aydin-Düzgit, "Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?," *Journal of Common Market Studies* 56, no. 3 (2018): 612–27, <https://doi.org/10.1111/jcms.12647>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian terdahulu dengan menjelaskan proses de-eropenisasi di Turki pasca peristiwa upaya kudeta militer tahun 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi dokumen yang dipublikasikan Uni Eropa, pemerintah Turki, dan laporan lain yang tersedia di daring internet.

Proses pembahasan dimulai dengan menjelaskan kerangka analisis yang menggunakan pendekatan dan konsep konstruktivisme, kekuatan normatif, eropenisasi, de-eropenisasi serta legitimasi agar dapat membentuk kerangka penelitian yang sistematis. Dilanjutkan dengan menjelaskan peran Uni Eropa sebagai aktor global yang memiliki kekuatan normatif dalam hubungan internasional. Pembahasan selanjutnya fokus pada penjelasan kebijakan luar negeri Turki: *zero problem with neighbor*. Berlanjut dengan pembahasan dinamika hubungan diplomatik antara Turki dan Uni Eropa sejak tahun 2005 hingga 2016. Terakhir, pembahasan akan berfokus pada perspektif elite partai AKP dan proses de-legitimasi terhadap Uni Eropa pasca peristiwa upaya kudeta militer tahun 2016.

Kerangka analisis

Penelitian ini akan berfokus pada hubungan antara multi pendekatan serta konsep yang terdapat konstruktivisme, kekuatan normatif, eropenisasi, de-eropenisasi, dan konsep legitimasi.

Manners (2002) menjelaskan kekuatan normatif dalam tiga karakteristik. Pertama, kekuatan normatif berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai dasar universalisme (kebebasan, demokrasi, penegakkan HAM, dan aturan hukum). Kedua, kekuatan normatif dijalankan melalui instrumen dialog atau debat. Ketiga, kekuatan normatif perlu memiliki dampak pada negara mitra baik itu melalui sosialisasi dan kerja sama dalam lingkup

regional.⁹ Forsberg (2009) mencoba untuk menambahkan pemahaman Manners sebelumnya dengan menjelaskan lima kriteria kekuatan normatif yaitu adanya identitas, kepentingan, praktik sesuai dengan norma, kredibilitas dalam memberikan pengaruh, dan hasil akhir yang dapat memberikan perubahan pada negara mitra.¹⁰ Namun, kedua cendekiawan ilmu hubungan internasional tersebut belum mampu mendefinisikan kekuatan normatif secara utuh. Perlu ada penyempurnaan dari cendekiawan lainnya untuk dapat menjelaskan definisi dari kekuatan normatif.

De Zutter (2010) mencoba untuk mempertajam definis kekuatan normatif melalui pemahaman atas kemampuan pengirim (Uni Eropa) dan penerima (negara mitra). Kekuatan normatif diartikan sebagai identitas yang memiliki kekuatan untuk membentuk kenormalan dalam sistem internasional melalui praktik yang digerakkan oleh norma dan penyesuaian norma yang dapat diterima oleh pihak lain.¹¹

Kekuatan normatif juga dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu inklusifitas dan eksklusifitas. Inklusifitas menyangkut kredibilitas Uni Eropa sebagai kekuatan normatif untuk mengonstruksikan nilai serta norma universalisme dan mengasimilasikannya dengan pihak ketiga. Sementara eksklusifitas adalah tentang kemampuan pihak ketiga untuk menerima norma serta nilai universalisme tersebut sesuai dengan realitas politik internal. Eksklusifitas juga menyangkut garis batas antara *self* (Uni Eropa) dan *the other* (pihak ketiga

⁹ Ian Manners, "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?," *Journal of Common Market Studies* (Oxford UK and Boston, USA : Wiley , 2002), <https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353>.

¹⁰ Tuomas Forsberg, "Normative Power Europe, Once Again: A Conceptual Analysis of an Ideal Type," *Journal of Common Market Studies*, 2011, <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02194.x>.

¹¹ Elisabeth De Zutter, "Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal," *Journal of European Public Policy* 17, no. 8 (December 1, 2010): 1106–27, <https://doi.org/10.1080/13501763.2010.513554>.

atau negara mitra). Uni Eropa sebagai pihak *self* yang memiliki definisi tunggal tentang nilai serta norma universalisme, perlu berhadapan dengan pihak ketiga sebagai pihak *other* yang sedang dalam proses konstruksi nilai dan norma secara mandiri. Hal yang menarik adalah proses perumusan di pihak *other* ini termasuk dalam bagian untuk membentuk *the self*.¹² Maka wajar apabila terjadi tensi antara *self* dan *other* dalam proses konstruksi nilai serta normal terutama di tengah dinamika politik yang menyangkut keduanya.

Di tengah proses dialog *normative* antara *self* dan *other* tersebut akan terjadi dinamika proses yang terbagi menjadi eropenisasi dan de-eropenisasi

Eropanisasi dapat diartikan sebagai proses konstruksi pemahaman norma, kebijakan, dan institusi yang dilakukan oleh komunitas Eropa (Uni Eropa) kepada komunitas di luar Eropa.¹³ Proses eropenisasi dapat dipengaruhi oleh kemampuan Uni Eropa untuk menginterpretasikan dan merepresentasikan norma, kebijakan, dan institusi tersebut agar dapat berhasil diimplementasikan oleh komunitas di luar Eropa.¹⁴

Sementara terminologi de-eropenisasi pertama kali digunakan untuk membahas fenomena kebijakan nasional yang semakin *less europe* di internal politik negara-negara anggota Uni Eropa.¹⁵ Pembahasan kemudian

bergerak untuk menjelaskan melemahnya peran Uni Eropa terhadap komunitas luar terutama negara yang sedang dalam proses keanggotaan tetap seperti Serbia¹⁶ dan Turki¹⁷ De-eropenisasi dapat didefinisikan sebagai hilang atau melemahnya kemampuan komunitas Eropa untuk tampil sebagai kekuatan politik dan juga normatif di negara di luar komunitas Eropa.¹⁸ De-eropenisasi dapat terjadi karena adanya dua kondisi.¹⁹ Pertama, Uni Eropa lemah dalam memberikan pengaruh kepada komunitas di luar Eropa dalam memberikan pemahaman norma, kebijakan, dan nilai. Kedua, timbulnya skeptis di dalam publik negara luar komunitas Eropa sebagai dampak melemahnya pengaruh Uni Eropa.

Terjadinya eropenisasi dan de-eropenisasi dapat dipengaruhi oleh faktor legitimasi yang dimiliki oleh Uni Eropa. Arti dari legitimasi dalam ilmu politik adalah generalisasi persepsi atau asumsi atas suatu konstruksi sosial yang dibangun atas norma, nilai, kepercayaan, dan pemahaman. Legitimasi dapat berdasarkan atas input dan output. Input adalah ketepatan proses perumusan kebijakan, keputusan tersebut apakah sesuai dengan kehendak publik atau tidak. Output adalah persepsi yang timbul di publik setelah perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, persepsi menjadi output dari kebijakan yang telah dirumuskan oleh aktor pembuat kebijakan. Namun, sebelum aktor penerima menerima kebijakan (publik) dari aktor pembuat kebijakan, terdapat

¹² De Zutter.

¹³ Senem Aydın-Düzgit and Alper Kaliber, "Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?," *South European Society and Politics* 21, no. 1 (January 2, 2016): 1–14, <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1155282>.

¹⁴ Alper Kaliber, "Contextual and Contested: Reassessing Europeanization in the Case of Turkey," *International Relations* 27, no. 1 (March 2013): 52–73, <https://doi.org/10.1177/0047117812455352>.

¹⁵ Kevin Featherstone and Claudio M. Radaelli, *The Politics of Europeanization, The Politics of Europeanization*, 2003, <https://doi.org/10.1093/0199252092.001.0001>.

¹⁶ Antonino Castaldo and Alessandra Pinna, "De-Europeanization in the Balkans. Media Freedom in Post-Milošević Serbia," *European Politics and Society*, 2018, <https://doi.org/10.1080/23745118.2017.1419599>.

¹⁷ Senem Aydın-Düzgit, "Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?," *Journal of Common Market Studies* 56, no. 3 (2018): 612–27, <https://doi.org/10.1111/jcms.12647>.

¹⁸ Aydın-Düzgit and Kaliber, "Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?"

¹⁹ Aydın-Düzgit and Kaliber.

ekspektasi yang timbul sebagai bentuk respons awal.²⁰

Kekuatan normatif sendiri masih berada dalam lingkup pendekatan konstruktivisme. Eris (2012) melihat Uni Eropa bertindak sebagai instrumen konstruksi nilai serta norma untuk meningkatkan stabilitas negara anggotanya.²¹ Konstruksi nilai serta norma tersebut dapat ditujukan bagi negara lain yang ingin menjadi bagian dari komunitas. Namun, konstruksi tersebut berada dalam instrumen kebijakan luar negeri. Tujuan dari kebijakan luar negeri yang bersifat normatif adalah untuk menjelaskan norma serta nilai komunitas kepada negara lain agar negara lain tersebut dapat menyesuaikan dengan lingkungan komunitas.

Dalam penelitian ini dapat diibaratkan Uni Eropa sebagai pihak *self* yang memiliki modal kekuatan normatif serta legitimasi sebagai input untuk mempromosikan agenda universalisme. Turki bertindak sebagai pihak *the other* yang dapat menerima agenda universalisme tersebut namun dihadapkan pada realita kondisi politik internal. eropenisasi atau de-eropenisasi dapat menjadi output perwujudan legitimasi Uni Eropa dalam mempromosikan agenda universalisme di Turki.

Analisis

Proses analisis dalam penelitian ini disusun melalui empat tahap. Tahap pertama, menjelaskan kebijakan luar negeri *zero problem with neighbor* yang dijalankan pemerintahan partai AKP dan Recep Tayyip Erdoğan. Tahap kedua, menjelaskan proses perluasan keanggotaan yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai upaya menjalankan

kekuatan normatif. Dua tahapan awal ini bertujuan untuk menjelaskan awal terjadinya eropenisasi di Turki. Tahap ketiga, menjelaskan kronologi dinamika hubungan luar negeri antara Turki dan Uni Eropa sebagai indikasi awal perubahan dari eropenisasi menjadi de-eropenisasi. Tahap keempat, menjelaskan dinamika de-eropenisasi dan menganalisis persepsi elite partai AKP terhadap legitimasi kekuatan normatif Eropa pasca upaya kudeta militer 15 Juli 2016.

a. Uni Eropa sebagai kekuatan normatif

Kebijakan Uni Eropa dalam berperan sebagai kekuatan normatif politik internasional tertulis dalam *The Treaty on European Union* (TEU) pasal 21. Dalam pasal 21 ayat 1, Uni Eropa memiliki kewajiban untuk membentuk sendiri, mengembangkan, serta memperluas nilai-nilai demokrasi, aturan hukum, penegakkan HAM, solidaritas, dan persamaan kepada pihak ketiga atau negara mitra melalui jalur kerja sama. Olli Rehn, mantan Komisioner Uni Eropa, menyebut bahwa Eropa dapat dijelaskan dengan nilai-nilai dan norma bukan hanya perbatasan geografi saja.²² Uni Eropa tidak memiliki batasan untuk menentukan negara mana yang menjadi sasaran *normative power* bagi mereka.

Terdapat lima strategi yang digunakan oleh Uni Eropa untuk menjalankan misi sebagai agen normatif dunia yaitu dengan cara memberikan status keanggotaan, regulasi, emulasi, rekonstruksi, dan bantuan luar negeri.²³ Namun, strategi yang paling efektif dijalankan oleh Uni Eropa adalah kebijakan memberikan status keanggotaan atau perluasan keanggotaan (*enlargement*). Strategi ini terbilang efektif untuk mengintegrasikan wilayah serta peradaban ke dalam satu wadah

²⁰ Ian Hurd, *After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council, After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council*, 2008, <https://doi.org/10.5860/choice.45-5234>.

²¹ Özgür Ünal Eriş, "European Neighbourhood Policy as a Tool for Stabilizing Europe's Neighbourhood," *Journal of Southeast European and Black Sea*, 2012, <https://doi.org/10.1080/14683857.2012.686012>.

²² European Commission, "Values Define Europe, Not Borders," 2005,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_05_32/SPEECH_05_32_EN.pdf.

²³ Pace, "The Construction of EU Normative Power*."

Uni Eropa. Contohnya adalah keberhasilan Uni Eropa melakukan perluasan keanggotaan ke timur Eropa atau negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Lituania, Latvia, Estonia, Slovenia, Hongaria, Polandia, Slowakia, dan Republik Ceko tergabung dalam keanggotaan penuh di Uni Eropa tahun 2004.²⁴

Turki termasuk dalam salah satu negara yang menjadi target perluasan keanggotaan Uni Eropa. Turki bersama negara lain seperti Albania, Makedonia Utara, Serbia, serta Montenegro telah mendapatkan status negara kandidat Uni Eropa. Gunter Verheugen sebagai anggota Komisioner Perluasan dari tahun 1999-2004 menyebut bahwa kehadiran Turki sebagai bagian dari Uni Eropa penting untuk memberikan perdamaian dan keamanan di wilayah Mediterania.²⁵ Verheugen menegaskan bahwa tujuan tersebut dapat tercapai jika Turki mampu terlebih dahulu menegakkan asas demokrasi, hukum, dan HAM selama proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa.²⁶

Inggris adalah negara yang paling mendukung proses perluasan keanggotaan Uni Eropa sekaligus konsisten mendukung Turki untuk segera menjadi anggota penuh Uni Eropa. Jack Straw, selaku *Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* Inggris sekaligus pihak yang paling mendukung dimulainya proses negosiasi keanggotaan Turki, menyebut keanggotaan Turki di Uni Eropa dapat menjadi simbol kuat bahwa kebudayaan Islam dan Barat di kehidupan modern.²⁷

²⁴ Richard McMahon, "Religion, Civilisation, Geography: Normative EU Studies and Eastern Enlargement," *Journal of Contemporary European Studies*, 2017, <https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1351927>.

²⁵ European Commission, "EU Commissioner Günter Verheugen Encourages Turkey to Proceed with Political Reform" (2000), https://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-246_en.htm.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ UKPOL, "Jack Straw – 2006 Comments on Turkey Joining the European Union (EU)," 2006, <http://www.ukpol.co.uk/jack-straw-2006-comments-on-turkey-joining-the-european-union-eu/>.

Melalui sub ini, dapat dibuktikan bahwa Uni Eropa adalah pihak *self*²⁸ dengan kekuatan normatif.²⁹ Uni Eropa dapat dikatakan sebagai *self* karena menjadi pemilik tunggal nilai-nilai universalisme di hadapan Turki. Uni Eropa telah memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai kekuatan normatif karena telah memenuhi tiga kriteria berdasarkan Manners (2002) yaitu promosi nilai-nilai universalisme, instrument dijalankan melalui dialog, dan dampak terhadap negara mitra, dalam hal ini Turki berhasil memenuhi Kriteria Kopenhagen. Komitmen Uni Eropa tersebut jelas tertulis dalam dalam *The Treaty on European Union* (TEU) pasal 21. Tahap selanjutnya adalah membahas kebijakan luar negeri zero problem with neighbor milik Turki sebagai bentuk keterbukaan untuk menjadi pihak *other* di hadapan Uni Eropa.

b. Kebijakan luar negeri Turki: zero problem with neighbor

Republik Turki dibentuk berdasarkan deklarasi kemerdekaan di tanggal 29 Oktober 1923. Mustafa Kemal Pasha atau sering disebut sebagai Atatürk menjadi tokoh pendiri Republik sekaligus menjadi Presiden Turki yang pertama. Kepemimpinan Mustafa Kemal didukung oleh kekuatan partai CHP (*Cumhuriyet Halk Partisi, Republican People's Party*) yang memiliki ideologi pembangunan kebijakan dalam negeri yang sekularis dan kebijakan luar negeri yang lebih pro terhadap Barat.³⁰ Dalam periode Perang Dingin, Turki memilih untuk bergabung aliansi Barat melalui skema kerja sama pertahanan NATO. Pasca Perang Dingin berakhir, Turki mulai terabaikan oleh aliansi Barat karena mereka memperhatikan posisi negara-negara bekas pendudukan Uni Soviet untuk dijadikan sebagai mitra strategis.

²⁸ De Zutter, "Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal."

²⁹ Manners, "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? "

³⁰ Erik J Zürcher, *Turkey: A Modern History*, 4th ed., 20171221 (I.B.Tauris, 2017).

Di sisi lain, politik dalam negeri mulai terjadi perubahan di awal era abad 21. Pemilihan umum tahun 2002 berhasil dimenangkan oleh partai politik bernama AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi, Justice and Development Party*) yang baru dibentuk oleh mantan wali kota Istanbul yaitu Recep Tayyip Erdoğan di tahun 2001. Meskipun didirikan oleh tokoh dan politisi muda yang memiliki ideologi Islam, Partai AKP berkomitmen untuk tidak menjadi partai Islam melainkan partai konservatif yang patuh pada nilai sekularisme dan konstitusi Republik Turki.³¹ Partai AKP juga mendukung kerja sama dengan Barat terutama dalam hal peningkatan nilai demokrasi, hukum, HAM di Turki.³² Maka dari itu, partai AKP berkomitmen untuk menjadikan Turki sebagai negara anggota penuh Uni Eropa.

Secara luas, kebijakan luar negeri Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan dan partai AKP adalah membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Konsep kebijakan luar negeri Turki era kepemimpinan Erdoğan dan partai AKP tidak bisa lepas dari sosok seorang Ahmet Davutoğlu yang merupakan mantan akademisi sekaligus mantan penasihat Perdana Menteri Erdoğan, mantan Menteri Luar Negeri (2009-2014) dan Perdana Menteri Turki (2014-2016). Davutoğlu memperkenalkan konsep kebijakan luar negeri Turki yang berasaskan *zero problem with Turkey's neighbor*.³³ Konsep kebijakan luar negeri Turki perlu dibangun atas pemahaman geopolitik dari aspek sejarah dan geografi.³⁴ Secara sejarah, Turki merupakan hasil bentukan peradaban Kerajaan Utsmaniyah yang sempat berjaya sebelum abad 20. Secara geografi, letak Turki berada di persimpangan antara Eropa, Asia, dan Afrika yang juga merupakan wilayah-

wilayah bekas pendudukan Kerajaan Utsmaniyah. Maka, pemahaman geopolitik Turki perlu dibangun atas hubungan baik dengan negara-negara yang berada di wilayah Eropa, Asia, dan Afrika.

Konsep kebijakan luar negeri tersebut tentu juga meliputi perlunya hubungan baik Turki dengan negara-negara yang berada di kawasan Eropa. Maka, setelah partai AKP berhasil memenangkan pemilihan umum 2002, prioritas partai adalah mempercepat proses reformasi hukum dan liberalisasi pasar agar Turki dapat segera memenuhi Kriteria Kopenhagen dan memulai negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa. Parlemen Turki yang didominasi oleh anggota partai AKP berhasil melakukan reformasi sistem ekonomi dengan cara melakukan privatisasi bank-bank yang telah mengakibatkan krisis panjang serta memberikan izin IMF untuk membantu perbaikan ekonomi di Turki untuk mengatasi krisis keuangan yang telah terjadi di Turki sejak akhir tahun 1990an. Parlemen Turki juga mereformasi hukum dengan melakukan amandemen konstitusi tahun 1982 yang abai terhadap kebebasan berpendapat dan banyak memberikan ruang bagi militer untuk intervensi pemerintahan. Upaya reformasi hukum tersebut termasuk di dalamnya adalah ratifikasi tentang penghapusan aturan hukuman mati sesuai amanah pasal 13 *European Convention on Human Rights* di tanggal 14 Juli 2004. Pada akhirnya, Turki berhasil mendapatkan kepastian tanggal dimulainya proses negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa di tanggal 3 Oktober 2005.

Dalam periode ini jelas bahwa Turki menunjukkan keterbukaannya untuk menjadi pihak *the other* di hadapan Uni Eropa.³⁵ Dibuktikan melalui keseriusan untuk mempercepat pemenuhan Kriteria Kopenhagen. Turki kemudian membuka diri untuk berdialog normatif dengan Uni Eropa melalui negosiasi keanggotaan tetap. Periode tahun 2002-2005 ini jelas juga membuktikan

³¹ Angel Rabasa and F Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey* (RAND Corporation, 2008).

³² *Ibid.*

³³ Ahmet Davutoğlu, *Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu*, Kure (Istanbul, 2001).

³⁴ Davutoğlu.

³⁵ De Zutter, "Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal."

bahwa eroplanisasi berjalan dengan baik. Faktor pertamanya adalah adanya kebijakan luar negeri partai AKP *zero problem with Turkey's neighbor* yang juga memprioritaskan hubungan baik dengan Uni Eropa. Kedua, kebijakan luar negeri partai AKP tersebut mampu berhasil dibuktikan melalui percepatan pemenuhan Kriteria Kopenhagen agar dapat segera memulai negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa. Selain itu, dinamika politik yang melibatkan Turki serta Uni Eropa belum banyak terjadi dalam periode tiga tahun tersebut. Maka perlu ada tinjauan lanjutan dalam mengeksplorasi dinamika politik antar keduanya setelah dimulainya negosiasi keanggotaan.

c. Hubungan luar negeri Uni Eropa dan Turki tahun 2005-2016

Periode antara tahun 2005 dan 2016 dipilih untuk menjelaskan dinamika politik yang terjadi antara dimulainya negosiasi keanggotaan sampai peristiwa kudeta militer di Turki. Pasca dimulainya negosiasi resmi keanggotaan di tanggal 3 Oktober 2005, Turki langsung menghadapi hambatan dalam menjalankan negosiasi dengan Uni Eropa. Keberadaan Siprus yang telah menjadi negara anggota tetap Uni Eropa tahun 2004 membuat Turki sulit untuk bernegosiasi dengan Uni Eropa. Siprus adalah wilayah sengketa antara Turki dan Yunani karena terdapat dua sistem pemerintahan antara Sipriot Turki dan Sipriot Yunani warisan dari konflik etnik yang terjadi di Perang Dunia 1. Uni Eropa hanya mengakui kedaulatan sekaligus status anggota penuh kepada pemerintahan Sipriot Yunani. Dalam proses negosiasi keanggotaan, Turki diminta untuk mengakui kedaulatan Siprus pemerintahan Sipriot Yunani. Namun, Turki menolak untuk mengakui kedaulatan dan memilih untuk mempertahankan martabat dan identitas Turki di dalam sistem pemerintahan Sipriot Turki. Pada akhirnya Uni Eropa memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi keanggotaan dengan Turki selama

negara tersebut tidak mengakui kedaulatan Sipriot Yunani.³⁶

Di tahun 2007, Nicolas Sarkozy mantan Presiden Prancis menyebut bahwa Turki bukanlah bagian dari Eropa baik secara geografis ataupun identitas. Namun, Sarkozy tetap menganggap Turki dapat menjadi mitra strategis Uni Eropa melalui skema kerja sama "*privileged partnership*".³⁷ Angela Merkel yang baru menjabat posisi Kanselir Jerman ikut mendukung pernyataan Sarkozy tersebut dengan mengeluarkan pernyataan bahwa "Eropa dengan Turki sebagai anggota penuh tidak akan menjadi Eropa yang sepenuhnya terintegrasi". Merkel tidak setuju dengan upaya Turki untuk melakukan peleburan identitas Asia dengan identitas Eropa. Pernyataan dari Merkel tersebut juga merupakan bentuk penegasan upaya dirinya untuk menjadikan koalisi Franco-German sebagai motor penggerak Uni Eropa.³⁸ Kehadiran Turki dapat mengancam kekuatan dua aliansi pendiri Uni Eropa tersebut.

Perlakuan tidak adil yang diberikan Uni Eropa kepada Turki menimbulkan perdebatan dalam politik dalam negeri Turki tentang kredibilitas Uni Eropa. *Euro-skepticism* mulai muncul ke permukaan dalam dinamika politik di Turki pasca dimulainya proses negosiasi keanggotaan. Terjadi penurunan angka dukungan publik Turki terhadap keanggotaan di Uni Eropa dari 74% di tahun 2002 menjadi

³⁶ European Commission, "Conclusions on the Enlargement of the EU Regarding the Accession of Bulgaria and Romania on 1 January 2007 and Accession Negotiations with Croatia and Turkey," 2006, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0657:EN:HTML>.

³⁷ Leon Hadar, "A Mediterranean Membership Club," *The National Interest*, 2007, <https://nationalinterest.org/commentary/a-mediterranean-membership-club-1597>.

³⁸ Catherine Macmillan, "Privileged Partnership, Open Ended Accession Negotiations and the Securitisation of Turkey's EU Accession Process," *Journal of Contemporary European Studies* 18, no. 4 (December 1, 2010): 447-62, <https://doi.org/10.1080/14782804.2010.535698>.

50% di tahun 2007.³⁹ Momentum tersebut menjadi titik balik komitmen partai AKP untuk tidak lagi berfokus dalam membangun hubungan dengan Uni Eropa. Dalam periode kepemimpinan yang kedua atau setelah tahun 2007, Perdana Menteri Erdoğan dan Partai AKP mulai fokus membangun kebijakan luar negeri yang mulai dekat dengan negara-negara Asia atau *Soft Euro-Asianism*. Strategi ini mengedepankan pendekatan hubungan luar negeri dengan kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Turki.⁴⁰

Hubungan luar negeri dengan negara-negara Asia dan Timur Tengah yang sebelumnya sempat terabaikan pada saat Perang Dingin, mulai coba kembali dibangun oleh Turki. Sementara hubungan luar negeri dengan Eropa tetap berlanjut meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dan fleksibel. Ahmet Davutoğlu, selaku Menteri Luar Negeri di periode kedua kepemimpinan Perdana Menteri Erdoğan, memastikan bahwa Turki tetap berkomitmen untuk menjadikan Turki sebagai negara anggota Uni Eropa.⁴¹

Meskipun Turki menerapkan strategi *soft euro-asianism*, Uni Eropa tetap memprioritaskan kerja sama dengan Turki terutama dalam bidang energi dan penanggulangan gelombang pengungsi dari Suriah. Hubungan baik dengan Turki dirasa penting bagi Uni Eropa untuk mengamankan pasokan energi gas alam. Bagi Uni Eropa, Turki diharapkan dapat menjadi *energy hub* antara negara-negara Eropa dengan kawasan Laut Hitam dan Laut Kaspia yang dikenal dengan pasokan gas alam yang melimpah. Kebijakan penguatan kerja sama Uni Eropa

dengan Turki di bidang energi dijelaskan dalam *Enlargement Strategy Paper of 2009* yang dipublikasikan oleh Komisi Eropa.⁴²

Uni Eropa juga memerlukan kerja sama dengan Turki dalam hal penanggulangan gelombang pengungsi dari Suriah di periode tahun 2013. Isu gelombang pengungsi dari negara konflik Suriah menjadi isu yang sama-sama melibatkan Uni Eropa dan Turki. Posisi Turki penting bagi Uni Eropa untuk menjadi *buffer zone* penanggulangan jumlah pengungsi yang masuk dari wilayah Timur Tengah. Pasca terjadinya perang saudara di Suriah, gelombang pengungsi dari Suriah banyak yang masuk ke wilayah Italia, Yunani, dan Siprus. Uni Eropa ingin menekan jumlah imigran yang masuk ke wilayah mereka karena dapat menimbulkan masalah sosial seperti ancaman terhadap sistem jaminan sosial, persaingan tidak sehat antara pekerja *low-skilled*, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya.⁴³

Melalui skema kerja sama *EU-Turkey Statement 2016*, pengungsi yang masuk secara ilegal melalui jalur Uni Eropa seperti Italia dan Yunani (Laut Mediterania) akan dikembalikan ke otoritas Turki. Sebagai bentuk imbalan, Uni Eropa wajib menerima pengungsi legal yang telah berada di Turki untuk kemudian diberikan izin tinggal. Selain itu, Turki juga mendapatkan hak percepatan pembahasan tentang liberalisasi visa Schengen bagi warga negara Turki yang ingin masuk ke wilayah Eropa. Namun, dengan syarat Turki dapat melakukan reformasi hukum sesuai dengan 72 kriteria hukum yang berkaitan dengan hukum migrasi, kewarganegaraan, dan kriminalitas agar harmonis dengan hukum di Uni Eropa.⁴⁴

³⁹ Hakan Yılmaz, "Euro-scepticism in Turkey: Parties, Elites, and Public Opinion," *South European Society and Politics* 16, no. 1 (March 1, 2011): 185–208, <https://doi.org/10.1080/13608741003594353>.

⁴⁰ Öniş and Yılmaz, "Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era."

⁴¹ Bülent Aras, "Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Revisited," *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 16, no. 4 (October 2, 2014): 404–18, <https://doi.org/10.1080/19448953.2014.938451>.

⁴² European Commission, "Enlargement Strategy 2009 Concerning the Countries of the Western Balkans, Iceland and Turkey," Official Journal of the European Union, 2009.

⁴³ Ratih Indraswari and Calvin Michel Sidjaya, "Migration in EU: Implication to the Regional Integration," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 10, no. 2 (2014): 98955, <https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1316.%p>.

⁴⁴ European Commission, "EU-Turkey Statement, 18 March 2016," 2016,

Melalui periode 11 tahun hubungan Turki dan Uni Eropa sebelum terjadinya peristiwa kudeta, Turki sebagai pihak *the other* langsung menghadapi hambatan untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa. Mulai adanya gejala awal de-eropenisasi melalui kebijakan Turki yang mulai berfokus pada negara-negara eurasia pasca pemilihan umum 2007. De-eropenisasi tersebut juga terjadi karena adanya skeptisme dalam tubuh Uni Eropa (*self*) untuk menerima Turki (*other*).

d. De-eropenisasi di Turki Pasca Kudeta Militer 15 Juli 2016

Di tanggal 15 Juli 2016, politik dalam negeri Turki terjadi guncangan setelah terjadi upaya kudeta militer yang ingin membubarkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partai AKP. Pihak militer merasa pemerintahan Presiden Erdoğan sudah terlalu condong menjadi negara Islam bukan negara sekuler. Presiden Erdoğan menuduh Fethullah Gulen dan jaringan pengikutnya yaitu Hizmet sebagai aktor dibalik upaya kudeta tersebut.⁴⁵

Terdapat tiga kebijakan Presiden Erdoğan dan partai AKP untuk merespons guncangan politik. Tiga kebijakan tersebut nantinya menjadi perdebatan antara Turki dan Uni Eropa menyangkut kekuatan normatif.

Pertama, tidak lama setelah upaya kudeta tersebut gagal, Presiden Erdoğan langsung mengeluarkan dekret *state of emergency* sebagai bentuk respons terhadap kegagalan kudeta militer. Dekret ini digunakan oleh Presiden Erdoğan untuk menangkap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan upaya kudeta dan juga afiliasi dengan jaringan Hizmet. Menurut laporan dari *Human Rights Watch*, sebanyak 100.000 aparatur sipil negara, dan 28.000 guru dipecat dan ada juga yang ditahan bersama dengan 2.200 hakim tanpa ada

proses investigasi.⁴⁶ Media, institusi pendidikan, rumah sakit, yayasan, dan asosiasi yang berafiliasi dengan Hizmet juga ikut dibubarkan dan asetnya disita oleh pemerintah tanpa proses peradilan.⁴⁷

Kedua, kegagalan kudeta menjadi momentum tepat bagi Presiden Erdoğan dan partai AKP untuk melakukan amandemen konstitusi sistem pemerintahan parlementer menjadi presidensial. Sejak masuk periode kedua kepemimpinan partai AKP di tahun 2007, partai tersebut mewacanakan untuk melakukan amandemen konstitusi parlementer yang dirasa tidak memberikan stabilitas politik di Turki. Partai AKP ingin mengubah konstitusi menjadi sistem presidensial dengan wewenang kepala pemerintahan dimiliki oleh Presiden bukan Perdana Menteri. Momentum pasca kudeta digunakan oleh Presiden Erdoğan dan partai AKP untuk bernegosiasi dengan partai-partai oposisi untuk mendukung amandemen konstitusi. Pada akhirnya, sebanyak 51,41% rakyat Turki mendukung referendum dan 48,59% menolak dalam referendum konstitusi tanggal 16 April 2017.⁴⁸ Pasca referendum, Presiden Erdoğan memiliki wewenang untuk menjadi kepala negara sekaligus pemerintahan Turki.

Ketiga, Presiden Erdoğan dan partai AKP mewacanakan untuk mengaktifkan kembali aturan hukuman mati di Turki agar para pihak yang mengancam konstitusi dapat jera. Aturan tentang hukuman mati sempat dihapus oleh pemerintahan Turki sebagai bentuk proses harmonisasi hukum agar sesuai dengan Kriteria Kopenhagen. Di tanggal 3 Oktober 2001, *Turkish Grand National Assembly* (lembaga legislatif Turki) sepakat untuk memenuhi persyaratan dasar dari Uni

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>.

⁴⁵ Reuters, "Turkey Rounds up Plot Suspects after Thwarting Coup against Erdogan," 2016, <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-primeminister-idUSKCN0ZV2HK>.

⁴⁶ Human Rights Watch, "Turkey: Events of 2016," 2017, <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey>.

⁴⁷ Human Rights Watch, "Turkey: Events of 2017," 2018, <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/turkey>.

⁴⁸ OSCE/ODIHR, "Constitutional Referendum, 16 April 2017," 2017, <https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/324816.pdf>.

Eropa yaitu menghapus hukuman mati untuk segala kasus hukum. Di tahun sebelumnya yaitu di tahun 2000, Turki menunda eksekusi hukuman mati bagi pendiri dan ketua organisasi PKK yaitu Abdullah Ocalan sebagai bukti bahwa Turki serius untuk patuh terhadap mandat Uni Eropa untuk menghapus hukuman mati. Turki juga merupakan negara anggota *Council of Europe* yang telah menandatangani perjanjian *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* sejak tahun 1954. Dari 47 negara anggota *Council of Europe*, hanya Rusia yang belum bersedia untuk menandatangani perjanjian penghapusan aturan hukuman mati untuk segala kasus hukum.

Ketiga kebijakan dalam negeri tersebut cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan normatif mulai melemah pasca kudeta militer. Penetapan status *state of emergency*, referendum untuk menambah wewenang Presiden Erdogan, serta diaktifkannya kembali hukuman mati tidak sesuai dengan agenda reformasi hukum, demokrasi, dan penegakkan HAM yang telah dipromosikan oleh Uni Eropa selama proses negosiasi keanggotaan. Presiden Erdogan partai AKP melihat secara internal kepentingan untuk mempertahankan posisi politik di internal Turki. Upaya ini merupakan bagian dari the *other* berproses untuk menjadi *self* melalui refleksi secara internal.

Uni Eropa ikut memberikan tanggapan atas kebijakan Presiden Erdogan serta partai AKP dalam merespons kegagalan upaya kudeta. Dalam laporan perkembangan negosiasi keanggotaan Turki tahun 2018, Uni Eropa mengutuk terjadinya upaya kudeta militer yang juga merenggut banyak korban jiwa di Turki tersebut. Namun, Uni Eropa juga secara tegas menyatakan bahwa tindakan yang diambil pemerintahan Presiden Erdoğan untuk menetapkan status *state of emergency* pasca kudeta dapat melunturkan semangat penegakkan HAM di Turki. Penangkapan, pemeriksaan, serta penahanan pihak terduga dengan jumlah masif tanpa aturan hukum yang jelas telah mengancam nilai HAM. Maka, Uni Eropa meminta Turki untuk segera mencabut

dekrit tentang *state of emergency* secepatnya apabila negara tersebut ingin tetap melanjutkan negosiasi keanggotaan.⁴⁹

Dalam hal keberhasilan Turki menetapkan konstitusi baru melalui amandemen 16 April 2017, Uni Eropa menilai bahwa amandemen konstitusi tersebut dapat mengancam *check and balances* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebab, amandemen konstitusi tersebut memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengangkat hakim tanpa persetujuan legislatif. Hal ini juga dapat berdampak negatif pada status *state of emergency* yang masih berjalan selama proses amandemen konstitusi.⁵⁰

Kebijakan terakhir yaitu diaktifkannya kembali hukuman mati di Turki jelas mendapat respons paling keras dari Uni Eropa. Melalui Kepala Perwakilan Tinggi Bidang Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini meminta Turki untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan pasca kudeta serta memastikan bahwa mengembalikan aturan hukuman mati dapat membuat negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa dapat terhenti.⁵¹ Kemudian di tanggal 24 November 2018, Parlemen Eropa membuat resolusi yang diteruskan kepada Komisi Eropa untuk sementara menutup negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa sampai Turki mampu merespons upaya kudeta sesuai dengan norma hukum Eropa.⁵² Dalam sidang parlemen tersebut juga Kepala Delegasi Parlemen Eropa untuk Turki Manolis Kefalogiannis memastikan bahwa pengembalian aturan hukuman mati akan secara otomatis

⁴⁹ European Commission, "2018 Turkey Report" (Brussels, 2018), <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf>.

⁵⁰ European Commission.

⁵¹ The Guardian, "Europe and US Urge Turkey to Respect Rule of Law after Failed Coup," 2016.

⁵² European Parliament, "European Parliament Resolution of 24 November 2016 on EU-Turkey Relations (2016/2993(RSP))," 2016, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?publRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN>.

menghentikan proses negosiasi keanggotaan Turki.⁵³

Uni Eropa telah berhasil membuat semua negara anggotanya untuk menghapus aturan tentang hukuman mati bagi segala bentuk kejahatan. Uni Eropa menghormati aturan dalam pasal 2 European Convention on Human Rights (ECHR) yang isinya adalah “*Everyone’s right to life shall be protected by law*”.⁵⁴ Uni Eropa juga berkomitmen untuk mempromosikan norma tersebut ke dalam bentuk kebijakan eksternal atau kepada negara lain di luar Uni Eropa. Komitmen tersebut dirumuskan dalam *EU Charter of Fundamental Rights*. Tidak terkecuali bagi Turki yang sedang dalam proses negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa.

Sikap Uni Eropa dalam menanggapi kebijakan kontroversial Turki dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan posisi *self* mereka sebagai pemilik kekuatan normatif.⁵⁵ Uni Eropa berupaya untuk mempertahankan kredibilitas sebagai kekuatan normatif dalam mengonstruksikan nilai serta norma universalisme di tengah gejolak politik dengan Turki yang sedang bertindak sebagai *the other* dan berproses untuk menjadi *the self*.

Namun, Turki sebagai pihak *the other* juga memiliki pandangan sendiri terhadap sikap *self* yang coba dipertahankan Uni Eropa.⁵⁶ Pandangan Turki secara umum dapat dianalisis melalui pernyataan sikap para elite partai AKP yang memang posisinya terancam di tengah upaya kudeta militer.

Uni Eropa telah membuat kami menunggu selama 54 tahun. Saya (Erdoğan) bertanya pada Anda negara

⁵³ European Parliament, “EU-Turkey Relations: ‘We Are Entering a New Phase,’” 2016, <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20161128STO53408/eu-turkey-relations-we-are-entering-a-new-phase>.

⁵⁴ Council of Europe, “European Convention on Human Rights (ECHR)” (n.d.), https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.

⁵⁵ De Zutter, “Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal.”

⁵⁶ De Zutter.

*mana yang terus menunggu selama 54 tahun? Apakah ada negara lain yang telah menunggu selama 50 tahun, 40 tahun atau 30 tahun? Turki telah terhenti di pintu Uni Eropa selama 54 tahun. Pertama-tama, ini tidak bisa ditoleransi dalam hal hubungan politik. Terlebih lagi, sampai hari ini, kami telah berusaha untuk memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam proses keanggotaan Uni Eropa dan membuat peraturan yang sesuai. Namun Uni Eropa belum menepati janji yang dibuat untuk kami. Liberalisasi visa akan dibebaskan tetapi janji itu belum ditepati juga oleh Uni Eropa. Mereka (Uni Eropa) sejauh ini tidak menepati satu pun janji.*⁵⁷

Kutipan tersebut adalah potongan wawancara Presiden Erdoğan dengan CNN Internasional di tanggal 19 April 2017. Kutipan tersebut merupakan tanggapan Presiden Erdoğan saat diminta tanggapan oleh jurnalis tentang pemberlakuan aturan hukuman mati yang dapat mengancam status keanggotaan Turki di Uni Eropa. Presiden Erdoğan secara tegas menyebut bahwa Turki tidak dapat lagi tunduk pada peraturan yang ditetapkan Uni Eropa. Presiden Erdoğan merasa Uni Eropa sebelumnya telah berlaku tidak adil karena tidak mampu menepati janjinya yaitu liberalisasi visa bagi warga negara Turki.

Pernyataan lain datang dari Mevlüt Çavuşoğlu selaku Menteri Luar Negeri Turki sekaligus petinggi partai AKP. Dalam perayaan *Europe Day* 2018, Çavuşoğlu menyatakan bahwa Uni Eropa perlu lebih sering melihat gejolak internal mereka sendiri. Çavuşoğlu melihat Uni Eropa telah abai terhadap nilai universalisme yang telah mereka bentuk sendiri karena bangkitnya sikap xenofobia dan Islamofobia yang ditujukan kepada imigran di negara-negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut dapat berguna untuk

⁵⁷ Presidency of The Republic of the Turkey, “‘All Must Respect the National Will,’” 2017, <https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/74835/mill-iradeye-herkesin-saygi-duymasi-lazim>.

mempertahankan legitimasi Uni Eropa dalam memberikan pengaruh kepada negara-negara di kawasan termasuk negara kandidat Uni Eropa.⁵⁸

Sementara pendapat lain datang dari Omer Celik selaku Menteri Urusan Uni Eropa Turki. Omer Celik memandang bahwa negara-negara di Uni Eropa telah terpapar paham ekstremis. Menurutny pihak-pihak yang telah terpapar ekstremisme tersebut senang dengan gagalnya dialog keanggotaan Turki di Uni Eropa. Lanjut, menurut Omer Celik ekstremisme menolak kehadiran Turki di Uni Eropa karena merasa identitas Turki sebagai negara sekuler dan mayoritas muslim tidak cocok dengan komunitas Uni Eropa.⁵⁹ Omer Celik juga pernah secara tegas menyerang Austria sebagai negara anggota Uni Eropa yang menyebarkan paham anti-Turki selama negosiasi berlangsung.⁶⁰

Ketiga pernyataan ketiga petinggi elite partai AKP di hadapan publik menjadi bukti bahwa partai tersebut sedang berupaya untuk melakukan de-legitimasi kekuatan normatif Uni Eropa di Turki pasca kudeta militer. Upaya tersebut menjadi indikasi awal adanya proses *the other* untuk menjadi *self* melalui de-eropenisasi. Ketiganya menyinggung kegagalan Uni Eropa dalam berlaku adil kepada Turki terutama dalam hal liberalisasi visa dan rasisme anti-Turki. Uni Eropa juga dianggap gagal dalam mempertahankan norma serta nilai universalisme setelah terhadap kebangkitan xenofobia dan Islamofobia di negara-negara anggota mereka. Input yang

diberikan oleh Uni Eropa kepada Turki selama proses negosiasi keanggotaan seperti pentingnya reformasi hukum, penegakkan HAM, dan demokrasi justru mendapat oput yang buruk dari Turki karena menurunnya legitimasi.⁶¹ Turki sendiri yang dihadapkan pada realitas politik internal berupa kudeta militer tidak dapat lagi menerima input dari Uni Eropa berupa kekuatan normatif.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses de-eropenisasi di Turki pasca terjadinya upaya kudeta militer di tanggal 15 Juli 2016. Dalam periode pasca kudeta, pemerintahan Presiden Erdoğan yang didukung oleh kekuatan partai AKP melakukan serangkaian kebijakan yang jauh dari prinsip reformasi hukum berdasarkan nilai demokrasi, hukum, dan HAM Uni Eropa. Uni Eropa sendiri memiliki wewenang untuk memberi tanggapan atas kebijakan Turki tersebut karena negara tersebut sedang dalam proses keanggotaan di Uni Eropa. Kondisi ini menciptakan posisi Uni Eropa sebagai *self* yang memiliki agenda promosi nilai universalisme dan Turki sebagai *the other* yang menerima agenda tersebut. Namun, peristiwa kudeta ini menjadi momentum bagi Turki untuk bertransformasi menjadi *the self* sekaligus didorong oleh kepentingan Presiden Erdogan dan Partai AKP untuk mempertahankan posisi kekuasaan di Turki pasca adanya upaya kudeta. Namun, dua kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya legitimasi Uni Eropa di Turki. Presiden Erdoğan dan partai AKP merasa Uni Eropa tidak memiliki lagi legitimasi di Turki setelah bangkitnya Islamofobia dan xenofobia di negara-negara anggotanya yang kontradiktif dengan nilai HAM. Selain itu, Uni Eropa juga tidak mampu menepati perjanjian berupa pemberian bebas visa kepada Turki setelah *EU-Turkey statement 2016*. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya legitimasi yang

⁵⁸ Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, "Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day," n.d., http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mevlüt-çavuşoğlu_-minister-of-foreign-affairs-of-turkey_-on-the-occasion-of-europe-day_-9-may-2018.en.mfa.

⁵⁹ Minister for Foreign Affairs Republic of Turkey, "Minister for EU Affairs and Chief Negotiator Ömer Çelik Evaluated the Agenda in London," 2017.

⁶⁰ Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey, "Minister for EU Affairs Ömer Çelik Evaluated the General Affairs Council Conclusions Adopted Yesterday," 2018.

⁶¹ Hurd, *After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council*.

dimiliki Uni Eropa dalam menjalankan fungsi sebagai kekuatan normatif dalam hubungan

Daftar Pustaka

- Aras, Bülent. "Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Revisited." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 16, no. 4 (October 2, 2014): 404–18. <https://doi.org/10.1080/19448953.2014.938451>.
- Aydin-Düzgit, Senem. "Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?" *Journal of Common Market Studies* 56, no. 3 (2018): 612–27. <https://doi.org/10.1111/jcms.12647>.
- . "Legitimizing Europe in Contested Settings: Europe as a Normative Power in Turkey?" *Journal of Common Market Studies* 56, no. 3 (2018): 612–27. <https://doi.org/10.1111/jcms.12647>.
- Aydın-Düzgit, Senem, and Alper Kaliber. "Encounters with Europe in an Era of Domestic and International Turmoil: Is Turkey a De-Europeanising Candidate Country?" *South European Society and Politics* 21, no. 1 (January 2, 2016): 1–14. <https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1155282>.
- Castaldo, Antonino, and Alessandra Pinna. "De-Europeanization in the Balkans. Media Freedom in Post-Milošević Serbia." *European Politics and Society*, 2018. <https://doi.org/10.1080/23745118.2017.1419599>.
- Council of Europe. European Convention on Human Rights (ECHR) (n.d.). https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.
- Davutoğlu, Ahmet. *Stratejik Derinlik: Türkiye'nin Uluslararası Konumu*. Kure. Istanbul, 2001.
- Eriş, Özgür Ünal. "European Neighbourhood Policy as a Tool for Stabilizing Europe's Neighbourhood." *Journal of Southeast European and Black Sea*, 2012. <https://doi.org/10.1080/14683857.2012.686012>.
- European Commission. "2018 Turkey Report." Brussels, 2018. <https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf>.
- . "Conclusions on the Enlargement of the EU Regarding the Accession of Bulgaria and Romania on 1 January 2007 and Accession Negotiations with Croatia and Turkey," 2006. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0657:EN:HTML>.
- . "Enlargement Strategy 2009 Concerning the Countries of the Western Balkans, Iceland and Turkey." Official Journal of the European Union, 2009.
- . "EU-Turkey Statement, 18 March 2016," 2016. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/>.
- . "EU Commissioner Günter Verheugen Encourages Turkey to Proceed with Political Reform." 2000. https://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-246_en.htm.
- . "Values Define Europe, Not Borders," 2005. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_05_32/SPEECH_05_32_EN.pdf.
- European Parliament. "EU-Turkey Relations: 'We Are Entering a New Phase,'" 2016. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/world/20161128STO53408/eu-turkey-relations-we-are-entering-a-new-phase>.
- . "European Parliament Resolution of 24 November 2016 on EU-Turkey Relations (2016/2993(RSP))," 2016. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN>.
- Featherstone, Kevin, and Claudio M. Radaelli. *The Politics of Europeanization. The*

- Politics of Europeanization*, 2003. <https://doi.org/10.1093/0199252092.001.0001>.
- Forsberg, Tuomas. "Normative Power Europe, Once Again: A Conceptual Analysis of an Ideal Type." *Journal of Common Market Studies*, 2011. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02194.x>.
- Hadar, Leon. "A Mediterranean Membership Club." *The National Interest*, 2007. <https://nationalinterest.org/commentary/a-mediterranean-membership-club-1597>.
- Human Rights Watch. "Turkey: Events of 2016," 2017. <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/turkey>.
- . "Turkey: Events of 2017," 2018. <https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/turkey>.
- Hurd, Ian. *After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council*. *After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council*, 2008. <https://doi.org/10.5860/choice.45-5234>.
- Indraswari, Ratih, and Calvin Michel Sidjaya. "Migration in EU: Implication to the Regional Integration." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR* 10, no. 2 (2014): 98955. <https://doi.org/10.26593/jihi.v10i2.1316>. %p.
- Kaliber, Alper. "Contextual and Contested: Reassessing Europeanization in the Case of Turkey." *International Relations* 27, no. 1 (March 2013): 52–73. <https://doi.org/10.1177/0047117812455352>.
- Macmillan, Catherine. "Privileged Partnership, Open Ended Accession Negotiations and the Securitisation of Turkey's EU Accession Process." *Journal of Contemporary European Studies* 18, no. 4 (December 1, 2010): 447–62. <https://doi.org/10.1080/14782804.2010.535698>.
- Manners, Ian. "Normative Power Europe: A Contradiction in Terms? ." *Journal of Common Market Studies*. Oxford UK and Boston, USA : Wiley , 2002. <https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353>.
- McMahon, Richard. "Religion, Civilisation, Geography: Normative EU Studies and Eastern Enlargement." *Journal of Contemporary European Studies*, 2017. <https://doi.org/10.1080/14782804.2017.1351927>.
- Minister for Foreign Affairs Republic of Turkey. "Minister for EU Affairs and Chief Negotiator Ömer Çelik Evaluated the Agenda in London," 2017.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Turkey. "Message by H.E. Mevlüt Çavuşoğlu, Minister of Foreign Affairs of Turkey, on the Occasion of Europe Day," n.d. http://www.mfa.gov.tr/message-by-h_e_-mevlüt-çavuşoğlu_-minister-of-foreign-affairs-of-turkey_-on-the-occasion-of-europe-day_-9-may-2018.en.mfa.
- . "Minister for EU Affairs Ömer Çelik Evaluated the General Affairs Council Conclusions Adopted Yesterday," 2018.
- Öniş, Ziya, and Şuhnaz Yılmaz. "Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era." *Turkish Studies* 10, no. 1 (March 1, 2009): 7–24. <https://doi.org/10.1080/14683840802648562>.
- OSCE/ODIHR. "Constitutional Referendum, 16 April 2017," 2017. <https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/324816.pdf>.
- Pace, Michelle. "The Construction of EU Normative Power*." *JCMS: Journal of Common Market Studies* 45, no. 5 (December 1, 2007): 1041–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00759.x>.
- Presidency of The Republic of the Turkey. "All Must Respect the National Will," 2017. <https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/74835/mill-iradeye-herkesin-saygi-duymasi-lazim>.

- Rabasa, Angel, and F Stephen Larrabee. *The Rise of Political Islam in Turkey*. RAND Corporation, 2008.
- Reuters. "Turkey Rounds up Plot Suspects after Thwarting Coup against Erdogan," 2016. <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-primeminister-idUSKCN0ZV2HK>.
- The Guardian. "Europe and US Urge Turkey to Respect Rule of Law after Failed Coup," 2016.
- UKPOL. "Jack Straw – 2006 Comments on Turkey Joining the European Union (EU)," 2006. <http://www.ukpol.co.uk/jack-straw-2006-comments-on-turkey-joining-the-european-union-eu/>.
- Yilmaz, Gözde. "From Europeanization to De-Europeanization: The Europeanization Process of Turkey in 1999–2014." *Journal of Contemporary European Studies* 24, no. 1 (January 2, 2016): 86–100. <https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1038226>.
- Yılmaz, Hakan. "Euro-scepticism in Turkey: Parties, Elites, and Public Opinion." *South European Society and Politics* 16, no. 1 (March 1, 2011): 185–208. <https://doi.org/10.1080/13608741003594353>.
- Zürcher, Erik J. *Turkey: A Modern History*. 4th ed. 20171221. I.B.Tauris, 2017.
- Zutter, Elisabeth De. "Normative Power Spotting: An Ontological and Methodological Appraisal." *Journal of European Public Policy* 17, no. 8 (December 1, 2010): 1106–27. <https://doi.org/10.1080/13501763.2010.513554>.